PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA

Khoirul Huda, Genes Arinta Pratiwi, Manahan Lubis, Nurlita Hawa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Indonesia
khoirulhuda@uinsu.ac.id, arintagenes@gmail.com

Abstract: This article examines Pancasila as a philosophical system that serves as the foundation of the Indonesian state and national identity. This study employs a qualitative method through a literature review, analyzing Pancasila from ontological, epistemological, and axiological perspectives. The findings show that the five principles of Pancasila are hierarchically and organically interconnected. Ontologically, Pancasila views human beings as God's creation with individual and social dimensions. Epistemologically, it emphasizes the pursuit of truth through rationality, deliberation, and togetherness. Axiologically, it reflects ethical values that promote unity, democracy, and social justice. These philosophical foundations demonstrate that Pancasila is not merely a normative ideology but also a practical guide for social and national life. Therefore, understanding Pancasila as a philosophical system is essential to addressing the challenges of globalization and modernization, preserving national identity, and strengthening social integration in Indonesia.

Keywords: Pancasila, philosophical system, ontology, epistemology, axiology, national ideology

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga dapat dipahami sebagai suatu sistem filsafat yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam kerangka filsafat, Pancasila memiliki peran sebagai orientasi nilai yang menuntun perilaku sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia.[1]

Kajian filsafat terhadap Pancasila bertujuan untuk memahami hakikat terdalam dari sila-sila Pancasila, bukan hanya sebagai rumusan yuridis, melainkan juga sebagai sistem nilai yang menyeluruh. Dengan demikian, pembahasan Pancasila dalam perspektif filsafat memungkinkan kita menelaah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari sila-sila Pancasila.[2] Pemahaman semacam ini sangat penting agar Pancasila tidak sekadar dipandang sebagai dokumen formal, tetapi sebagai pedoman hidup yang bersifat dinamis, kontekstual, dan aktual.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki susunan sila yang hierarkis dan piramidal, di mana sila pertama menjadi dasar dari sila-sila berikutnya, sementara sila-sila lainnya memperjelas dan mengkonkretkan nilai ketuhanan.[3] Struktur ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah sekumpulan sila yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan mengikat secara organis. Kesatuan inilah yang menjadikan Pancasila sebuah sistem filsafat yang utuh, menyatukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Di tengah tantangan globalisasi, modernisasi, dan penetrasi ideologi asing, pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi semakin relevan. Hal ini dikarenakan Pancasila dapat dijadikan landasan filosofis dalam membangun karakter bangsa dan menjaga identitas nasional.[4] Dengan menghayati Pancasila secara filosofis, bangsa Indonesia mampu menempatkan nilai-nilai luhur sebagai dasar kehidupan berbangsa sekaligus menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang hidup, menyatukan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam kerangka pemikiran bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menelaah makna, nilai, dan hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat, yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan melalui pemahaman interpretatif dan analisis mendalam.[5] Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek filosofis Pancasila yang terkandung dalam literatur akademik, dokumen resmi, dan karya ilmiah para pakar filsafat maupun Pancasila.

Jenis penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berkaitan erat dengan teks, pemikiran, dan literatur yang membahas tentang Pancasila dari sudut pandang filsafat.[6] Sumber data utama penelitian ini berasal dari buku-buku karya para tokoh seperti Notonagoro, Kaelan, Yudi Latif, dan beberapa penulis kontemporer yang menelaah Pancasila dalam perspektif filsafat. Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, dokumen konstitusional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.[7] Proses ini mencakup kegiatan membaca, mencatat, serta mengorganisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah. Setiap literatur yang dikaji dianalisis berdasarkan konteks historis, filosofis, dan aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).[8] Analisis ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dan membangun kerangka pemikiran yang komprehensif mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pendekatan

ini memungkinkan peneliti menelaah keterkaitan sila-sila Pancasila dengan dimensi filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan berbagai literatur yang berbeda, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer.[9] Hal ini penting agar hasil penelitian tidak bersifat parsial, melainkan menyajikan gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik dalam memahami teks.[10] Pendekatan hermeneutik membantu peneliti menafsirkan makna yang terkandung dalam rumusan sila-sila Pancasila, serta menempatkan nilai-nilainya dalam konteks keindonesiaan yang dinamis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh mampu memberikan pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa di era modern.[11]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat yang menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia tidak sekadar berfungsi sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai kerangka filosofis yang memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.[12] Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal, namun sekaligus lahir dari konteks historis dan kultural bangsa Indonesia.

Dalam kerangka filsafat, hakikat Pancasila terletak pada sifatnya yang integral dan sistematis.[13] Sila-sila Pancasila bukanlah kumpulan norma yang terpisah, melainkan saling berhubungan dan membentuk

satu kesatuan yang bulat. Struktur hierarkisnya memperlihatkan bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan transendental bagi sila-sila lainnya. Hubungan ini menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang utuh dan koheren.

Hakikat lain dari Pancasila sebagai filsafat adalah kedudukannya yang bersifat reflektif dan kritis.[14] Ia mampu dijadikan pedoman untuk menilai, mengarahkan, serta memperbaiki kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui filsafat, Pancasila tidak berhenti pada tataran normatif-konstitusional, tetapi juga menjadi orientasi etis dalam tindakan. Dengan demikian, Pancasila menempati kedudukan sebagai "filsafat praktis" yang hidup dalam keseharian bangsa.

Selain itu, hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang pluralistik.[15] Ia mengintegrasikan berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya dalam satu ikatan nilai kebangsaan. Kesatuan ini tidak meniadakan perbedaan, tetapi menyatukannya dalam kerangka kebhinekaan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pancasila melalui Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat terhadap Pancasila diperlukan agar kita dapat memahami makna terdalam sila-sila Pancasila. Melalui pendekatan ini, Pancasila tidak sekadar dimaknai sebagai rumusan hukum, tetapi sebagai sistem filsafat yang mengandung dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi.[16] Pendekatan filsafat menempatkan Pancasila sebagai objek refleksi kritis untuk memahami dasar keberadaannya dan relevansinya dalam kehidupan berbangsa.

Pendekatan filsafat juga memungkinkan kita melihat Pancasila sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang.[17] Pancasila tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan kontekstual, sehingga selalu dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Melalui perspektif filsafat, Pancasila dapat diuji, ditafsirkan, dan diaktualisasikan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, pendekatan filsafat terhadap Pancasila menempatkan ideologi ini dalam posisi transendental sekaligus imanen.[18] Transendental karena sila pertama menegaskan dimensi ketuhanan, sementara imanen karena nilai-nilainya diwujudkan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian, filsafat membantu menjembatani antara gagasan normatif Pancasila dengan praktik kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga memperkaya pemahaman kita bahwa Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, tetapi juga sebuah filsafat hidup bangsa.[19] Artinya, Pancasila dapat menjadi dasar teoretis untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti globalisasi, demokratisasi, dan pluralisme.

Dasar Ontologis Sila-Sila Pancasila

Ontologi berkaitan dengan hakikat keberadaan. Dasar ontologis Pancasila berpangkal pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi rohani dan jasmani, individu dan sosial.[20] Sila-sila Pancasila merefleksikan realitas manusia Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berbangsa, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, eksistensi Pancasila tidak terlepas dari realitas antropologis bangsa Indonesia.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar ontologis tertinggi yang melandasi sila-sila lainnya.[21] Hal ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi religiusitasnya. Sila kedua hingga kelima kemudian menjelaskan hakikat manusia dalam hubungannya dengan sesama, masyarakat, bangsa, dan keadilan.

Ontologi Pancasila juga menunjukkan sifat monopluralis manusia Indonesia.[22] Artinya, manusia dipandang sebagai kesatuan yang utuh, tetapi memiliki aspek yang beragam: individu dan sosial, material dan spiritual, pribadi dan masyarakat. Sila-sila Pancasila lahir sebagai jawaban atas realitas manusia monopluralis ini.

Dengan demikian, dasar ontologis Pancasila bukanlah sesuatu yang abstrak semata, melainkan berpijak pada kenyataan hidup manusia Indonesia.[23] Hal ini menegaskan bahwa Pancasila lahir dari, oleh, dan untuk manusia Indonesia itu sendiri.

Dasar Epistemologis Sila-Sila Pancasila

Epistemologi membahas tentang sumber, cara, dan validitas pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila bersumber dari akal budi manusia, pengalaman historis bangsa Indonesia, dan wahyu Ilahi yang hidup dalam tradisi agama bangsa.[24] Dengan demikian, pengetahuan yang melandasi Pancasila bukanlah spekulasi semata, melainkan hasil integrasi antara rasio, pengalaman, dan iman.

Epistemologi Pancasila juga tampak dalam cara bangsa Indonesia merumuskan dasar negara melalui perdebatan dan musyawarah dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.[25] Proses tersebut mencerminkan penggunaan akal budi, pengalaman sejarah, serta kesepakatan kolektif sebagai dasar epistemologis. Validitas pengetahuan Pancasila dapat dilihat dari kemampuannya bertahan sebagai dasar negara sejak Indonesia merdeka hingga kini.[26] Nilai-nilainya terbukti relevan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, epistemologi Pancasila berlandaskan pada konsistensi, koherensi, dan manfaat praktis. Selain itu, dasar epistemologis Pancasila juga memperlihatkan integrasi antara pengetahuan teoretis dan praktis.[27] Artinya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ide, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata demi kesejahteraan rakyat.

Dasar Aksiologis Sila-Sila Pancasila

Aksiologi berkaitan dengan nilai dan kegunaan. Dasar aksiologis Pancasila terletak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.[28] Nilai-nilai ini bersifat universal, tetapi diaktualisasikan sesuai konteks kehidupan bangsa Indonesia.

Sila pertama menegaskan nilai religiusitas, yang menjadi dasar moral seluruh sila. Sila kedua memuat nilai kemanusiaan yang menegaskan martabat manusia. Sila ketiga mengandung nilai persatuan yang menjaga integrasi bangsa. Sila keempat menegaskan nilai demokrasi berdasarkan musyawarah. Sila kelima mengandung nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan bernegara.[29]

Nilai-nilai aksiologis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praksis.[30] Artinya, Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kebijakan politik, pendidikan, hukum, maupun budaya. Tanpa aktualisasi nilai-nilai aksiologis, Pancasila akan berhenti sebagai ide yang abstrak. Dengan demikian, dasar aksiologis Pancasila menegaskan bahwa ideologi ini merupakan filsafat yang operasional.[31] Nilai-nilainya memberi arah sekaligus tujuan bagi bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan yang adil, beradab, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat Pancasila tidak hanya sebatas ideologi dan dasar negara, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang menyatukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan filsafat, Pancasila dapat dipahami secara mendalam pada tataran ontologis, epistemologis, dan aksiologis sehingga memiliki landasan yang kokoh sebagai sistem nilai bangsa Indonesia.

Dasar ontologis Pancasila menegaskan bahwa sila-sila Pancasila bersumber dari manusia Indonesia yang memiliki harkat, martabat, serta dimensi spiritual dan sosial. Dasar epistemologis Pancasila menekankan bagaimana bangsa Indonesia memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui musyawarah, konsensus, dan semangat kebersamaan. Sedangkan dasar aksiologis Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun kenegaraan. Dengan pemahaman yang filosofis, Pancasila dapat menjadi pedoman aktual yang relevan untuk menjawab tantangan zaman, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Pancasila sebagai sistem filsafat pada akhirnya berfungsi menjaga integrasi bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bermoral, adil, serta berkeadaban.

PUSTAKA ACUAN

Aglia, A., & Saputra, M. P. A. The role of Pancasila as a political ethical system: Understanding Indonesia's ideological foundation and moral guidance. *International Journal of Humanities, Law and Politics, 2*(3). 2024.

Hastangka, & Ediyono, S. Pancasila education in Indonesia: The debate on Pancasila in the post reform era between legitimation, recognition, and institutionalization during 2000– 2021. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 20*(1). 2023.

Jurnal Islamic Studies. Pancasila sebagai sistem filsafat. *JIS: Journal Islamic Studies.* 2024. Kaelan. *Pendidikan Pancasila.* Yogyakarta: Paradigma. 2002.

Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2013

Latif, Y. *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia. 2011.

Notonagoro. *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh. 1975.

Prasojo, S. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. [PDF]. Universitas Esa Unggul, 2020

Sihombing, E. S., et al. Pancasila sebagai landasan filosofis hukum negara Indonesia.

Sapientia. 2025. Yulianti, S. Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu Administrasi (JMIA).* 2024.

Zulkarnain, M. Pancasila sebagai filsafat ilmu nasional. *De Cive.* 2024.

Zulfikar, R. Reaktualisasi Pancasila sebagai landasan filosofis hukum. *Governance.* 2024.

Zulkarnaen, I.Kajian Pancasila sebagai pilar filosofis demokrasi Indonesia dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkeadilan. *Aliansi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa.* 2025.